



**WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR : 140/22 /Kpts/WN-IND.T/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO NAGARI
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Timur tentang Pembentukan Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan WALI NAGARI, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20219 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
 22. Peraturan Menteri Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja

- Negara Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 38. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 39. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
 40. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 41. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
 42. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
 43. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Nagari Inderapura Timur Tahun 2021 Nomor 02);
 44. Peraturan Wali Nagari Inderapura Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 ; (Berita Nagari Inderapura Timur Tahun 2021 Nomor 03); dan

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat
Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Wali Nagari tentang Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
- KESATU** : Susunan Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah WALI NAGARI dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD;
 2. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan, penyebaran / penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari ;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
 3. Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVI D-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID- 19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa

- isolasi mandiri;
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID- 19; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.
4. Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
 - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid - 19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKS, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderapura Timur
pada tanggal 25 Maret 2021

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten .Pesisir Selatan
2. Forkompimcam Airpura;
3. Kepala UPTD Puskesmas Airpura;
4. Tim Posko Tingkat Nagari PPKM Nagari Inderapura Timur (yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Timur
 Nomor : 140/22/Kpts/WN-IND.T/. III /2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Nagari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

SUSUNAN
TIM POS KOMANDO NAGARI
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DESA INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	BASREL	WALI NAGARI
2	WAKIL KETUA	RUZAN	Ketua BPD
3	TIM PENCEGAHAN		
	Anggota	ERDIZAL	Kepala Kampung Koto pandan
	Anggota	BUSTANUDIN	LPMN
	Anggota	IPAN BASTEN	LPMN
	Anggota	UJANG HEPI SANJAYA	LPMN
	Anggota	JALINUS	TP PKK
	Anggota	ELI SURIANI	TP PKK
	Anggota	DARISON	Karang Taruna
	Anggota	VIREL BRAMASTA	Karang Taruna
	Anggota	KHAIRUL	Satlinmas
	Anggota	INDRA BASRI	Satlinmas
	Anggota	BAHRUL	Tokoh Masyarakat
	Anggota	SYAFRIADI INDRA	Tokoh Masyarakat
	Anggota	VOVI INKRA	KPMN
	Anggota	ANGGRELA DENCI	KPMN
	Anggota	SUSANTI	KPMN
	Anggota	NURIA MARPI INDRA	KPMN
	Anggota	M.IDRIS	KPMN
4	TIM PENANGANAN		
	Anggota	ERDIZAL	Kepala Kampung Koto Pandan
	Anggota	AHMAD SUKJAR	Kepala Kampung Lubuk Pandan
	Anggota	MAYLI YUSRA	Bidan Desa
	Anggota	RAPIOLA KEMALA DEWI	Perawat
	Anggota	JESMISAH	Kader Kesehatan Desa
	Anggota	JESMANI	Kader Posyandu
	Anggota	KENI EVIA	Kader Posyandu
	Anggota	FEBRI RAHMADANI	Kader Pembangunan Desa (KPM)

5	TIM PEMBINAAN		
	Anggota	ERDIZAL	Kepala Kampung Koto pandan
	Anggota	AHMAD SUKJAR	Kepala Kampung Lubuk Pandan
	Anggota	KHAIRUL	Satlinmas
	Anggota	INDRA BASRI	Satlinmas
	Anggota	JAFRUDIN	Tokoh Agama
	Anggota	M.YAMIN	Tokoh Agama
	Anggota	DARISON	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	VIREL BRAMASTA	Karang Karuna / Tokoh Pemuda
	Anggota	BAHRUL	Tokoh Masyarakat
	Anggota	SYAFRIADI INDRA	Tokoh Masyarakat
6	TIM PENDUKUNG		
	Koordinator	NOVITA KUMALA SARI	Sekretaris Nagari
	Anggota	ROZA EDWAR GANAPI	Perangkat Nagari
	Anggota	RISMANEDI	Perangkat Nagari
	Anggota	SONYA SESMITA	Perangkat Nagari
	Anggota	NINI WATI	Perangkat Nagari
7	MITRA		
	MITRA	Bripka. MULYADI	BHABINKAMTIBMAS
	MITRA	JAFRIZAL	BABINSA
	MITRA	Team	SATPOL PP Kec. Airpura
	MITRA	Team	BPBD Kab. Pesisir Selatan
	MITRA	Team	Satgas Penanganan Covid 19 Kec
	MITRA	Team	Tenaga Kesehatan Puskesmas Kcc
	MITRA	Team	Pendamping Desa Kec. Airpura
	MITRA	Team	Pendamping TKS Kcc. Airpura
	MITRA	Team	Pendamping PKH Kcc. Airpura
	MITRA	Team	Penyuluh Pertanian Kec. Airpura
	MITRA	Team	Penyuluh Agama Kcc. Airpura

Ditetapkan di Inderapura Timur
pada tanggal : 25 Maret 2021

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

